

RENCANA AKSI



DINAS SOSIAL TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami sampaikan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode satu tahun yang memuat uraian dan indikator kinerja, tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan, formulasi, target kinerja, anggaran, target pelaksanaan per triwulan, dan penanggung jawab pelaksanaan untuk memberikan panduan dan pedoman dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Metro.

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 merupakan salah satu bentuk implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Kota Metro terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Demikian Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat memberikan dampak yang lebih baik khususnya terhadap kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro dan mendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Metro pada umumnya.

**KERALA DINAS SOSIAL KOTA METRO**
SRI AMANTO, S.H., M.H.
NIP. 196804201993031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Metro.....	2
BAB II RENCANA STRATEGIS.....	3
2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	3
2.2. Program dan Kegiatan.....	3
2.3. Rencana Kerja Tahun 2024.....	5
BAB III PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat Sasaran, Indikator Kerja, program, kegiatan dan Anggaran, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Aksi memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah.

Rencana Aksi pada Dinas Sosial Kota Metro Tahun Anggaran 2024 merupakan sebuah dokumen perencanaan yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Metro khususnya, dan pembangunan daerah Kota Metro pada umumnya. Proses penyusunan Rencana Aksi Dinas Sosial dimulai dengan tahap persiapan yaitu mengumpulkan pengolahan data dan informasi dari tiap-tiap bidang, selanjutnya menganalisa program dan kegiatan, untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial Kota Metro sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Metro. Hal lainnya, perumusan kegiatan prioritas juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Kerja Tahunan, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Dinas Sosial dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program / kegiatan / sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Tahunan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib atau pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dengan tetap mempertimbangkan jumlah pagu anggaran;
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran dan biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan anggaran.

Maksud penyusunan dokumen Rencana Aksi Dinas Sosial Kota Metro yaitu sebagai salah satu referensi sekaligus sebagai panduan untuk mengimplementasikan formulasi kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Rencana Aksi diantaranya sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan program-program prioritas daerah yang tercantum dalam misi 2 RPJMD Pemerintah Kota Metro Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani dan sehat secara sosial.

2. Sebagai tindak lanjut dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang lebih khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran.

1.2. Tugas, dan Fungsi Dinas Sosial Kota Metro.

1.2.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 disebutkan bahwa Dinas Sosial Kota Metro mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

1.2.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Sosial Kota Metro menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- e. Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan UPT Dinas

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Dinas Sosial menyusun Rencana Program yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dinas Sosial mendukung ke dalam misi ke-2 (dua) RPJMD Pemerintah Kota Metro yaitu mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dan perumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Metro adalah untuk mendukung visi Pemerintah Kota Metro yaitu "Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera Dan Berbudaya" yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Metro 2021 – 2026.

2.2. Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja yang spesifik dan jelas serta dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Adapun program yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro pada Tahun 2024 berjumlah 7 (tujuh) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan, yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.1.3. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
1.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

1.3.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.3.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.3.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.3.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
1.3.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.4.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.4.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.5.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5.3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
2.1.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota
2.1.1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota.
2.1.2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota.
2.1.3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota.
3.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN.
3.1.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal
3.1.1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal.
4.	PROGRAM REHABILITAS SOSIAL
4.1.	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
4.1.1.	Penyediaan permakanan
4.1.2.	Penyediaan sandang
4.1.3.	Pemberian bimbingan fisik, mental spritual dan sosial.
4.1.4.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
4.1.5.	Pemberian Layanan Kedaruratan
4.1.6.	Pemeberian Layanan Rujukan
4.2.	Rehabilitas Sosal Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
4.2.1.	Pemberian layanan kedaruratan
4.2.2.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
4.2.3.	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Kabupaten / Kota

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
5.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
5.1.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota.
5.1.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
5.1.3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
5.1.4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
6. PROGAM PENANGANAN BENCANA
6.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota
6.1.1. Penyediaan Makanan
7. PROGAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
7.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
7.1.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota.

2.3. Rencana Kerja Tahun 2024

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam program kerja sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Sosial memetakan 7 (tujuh) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh sembilan) Sub-Kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Metro Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp. 5.480.916.429,- (lima milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan serta indikator dan anggaran yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024

URUSAN / BIDANG URUSAN / PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN		KINERJA	INDIKATOR	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
1		2	3	4	5
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.712.588.029
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.158.050
Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.629.350	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.519.350
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.009.350

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.063.639.861
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 ASN	2.587.562.661
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 orang	394.400.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	15 Orang	69.760.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	692.250
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	11.224.950

Administrasi Umum Perangkat Daerah				265.416.950
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 jenis alat listrik	9.175.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 jenis	36.024.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 jenis	83.970.150
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Jenis Barang Cetak & Penggandaan Surat	20.753.800
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8 surat kabar	22.872.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Kali	92.622.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				63.343.168
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 materai	3.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Jenis	59.843.168
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				310.030.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit kendaraan	188.510.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 peralatan	21.520.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Perbaikan dapur dan ruang pelayanan	100.000.000
B. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				615.686.900
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota				615.686.900
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	5 orang	40.000.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	32 orang	235.594.500
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	18 lembaga	340.092.400
C. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGRAN MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				3.000.000
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk Dipulangkan ke desa / kelurahan asal				3.000.000
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten / Kota	3 orang	3.000.000

D. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				781.383.050
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				343.826.350
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	110 orang	90.419.750
Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	135 orang	29.999.850
Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	34 Orang	38.740.600
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhiny Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	5 orang	6.580.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	15 orang	53.328.350
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	10 orang	42.029.400

Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	18 orang	77.524.200
Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	5.204.200
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				437.556.700
Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	35 orang	75.238.000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	4433 orang	120.860.400
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3000 anggota LLI	241.458.300
E. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				255.825.900
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota				255.825.900
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penjangkauan Anak - Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	11.000 keluarga	34.031.100
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota	7400 orang	128.821.800
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	250 keluarga	60.973.000

Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	22 orang	32.000.000
F. PROGRAM PENANGANAN BENCANA				62.432.550
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota				62.432.550
Penyediaan Makanan	Terpenuhinya orang yang Mendapatkan Makanan 3 x 1 Hari dalam masa Tanggap Darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah paket bansos makanan dan dapur umum	40 orang	62.432.550
G. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				50.000.000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota				50.000.000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah makam yang terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	75 paket dan dapur untuk konsumsi 1000 orang	50.000.000
JUMLAH				5.480.916.429

Tabel 2.2 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024

URUSAN / BIDANG URUSAN / PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA												
			Target	Januari	februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pegawai ASN dan THL	2 Dokumen	V											V

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pegawai ASN dan THL	1 dokumen	V									V			V
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pegawai ASN dan THL	1 dokumen	V									V			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Tenaga THL	18 orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Honro Pengelola Keuangan	11 Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pegawai ASN dan THL	1 Laporan			V			V				V			V
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Pegawai ASN dan THL	2 Laporan			V			V				V			V
Administrasi Umum Perangkat Daerah																

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Belanja alat tulis kantor	20 Paket			✓			✓			✓			✓
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pegawai ASN dan THL	3 Paket						✓		✓				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Belanj Barang habis pakai, belanja jasa kantor dan brelnja barang jasa	85 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Belanja barang pakai habis													

		_Cetak Spanduk		✓		✓			✓					✓	
		_Cetak Kebutuhan Kantor		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓
		_Belanja penggandaan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	Belanja langganan koran	8 Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan biaya dinas	17 Laporan			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja materai	300 Laporan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Belanja tagihan telp		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Belanja tagihan listrik		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan.		√						√	√	√			
		Belanja pemeliharaan alat angkutan, alat angkutan darat bermotor, kendaraan bermotor penumpang.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Belanja pemeliharaan alat angkutan, alat angkutan darat bermotor, kendaraan bermotor beroda dua		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, alat alat kantor lainnya (AC)			√										

		Belanja pemeliharaan komputer (pemeliharaan personal komputer notebook)				√		√	√		√	√		√	√
		Belanja pemeliharaan komputer (servis computer)		√	√		√		√	√		√		√	√
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja - bangunan gedung kantor (2 {dua} paket)	1 Unit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
B. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL															
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota															

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Pencairan insentif PSM per tri wulan	30 orang			V			V			V			V
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Pencairan insentif TKSK per tri wulan	5 orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Tali asih kepada perintis kemerdekaan, ziarah hari2 besar, renenungan suci, bantuan Hibah, Karang Taruna , moneva, evaluasi LKS se- Kota Metro.	27 lembaga			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
C. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARAN MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN															
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk Dipulangkan ke desa / kelurahan asal															

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal Kewenangan	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
D. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	110 orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	135 orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten /Kota	Penyediaan alat bantu kursi roda, alat bantu jalan, sensorik (pendengaran) bagi penyandang disabilitas fisik dan lanjut usia	11 Orang					✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	Terpenuhinya orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Bimbingan fisik, Mental, Spiritual dan Sosial untuk penerima bantuan modal bagi disabilitas yang memiliki usaha.	15 orang							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	Pemberian bantuan tambahan modal usaha bagi keluarga penyandang disabilitas yang memiliki usaha.	10 orang							✓	✓	✓	✓			

Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten / Kota																
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	Bantuan uang makan / transport bagi orang terlantar dalam perjalanan dan pembinaan komunitas punkserta bantuan sosial bagi warga yang akan berobat keluar daerah	21 orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Sosial	10 orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																	

Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		55 orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat - Program Keluarga Harapan (KPM - PKH).	4431 orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN), LLI, LKKS dan Rumah Belajar KOPALA.	3 dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
E. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota																

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten / Kota yang di data.	Terlaksananya pendataan / verifikasi lapangan, pengumpulan dan pemilahan serta penginputan data	7600 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota	Diperolehnya data terpadu kesejahteraan sosial dan data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang terupdate.	7600 Keluarga	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Fasilitasi pelaksanaan program bantuan sosial kesejahteraan keluarga (sembako)	250 keluarga	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Fasilitasi pendampingan bantuan kesejahteraan sosial masyarakat	22 orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
F. PROGRAM PENANGANAN BENCANA																	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota																	
Penyediaan Makanan	Jumlah paket bansos makanan dan dapur umum	Bantuan korban bencana alam	26 orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
G. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota																	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah makam yang terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	Pemeliharaan akan keindahan Taman Makam Pahlawan Kota Metro	1 Makam	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Sosial Kota Metro merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial yang memuat Program, Kegiatan dan Sub - Kegiatan.

Rencana Aksi Dinas Sosial Kota Metro Tahun Anggaran 2024 ini berfungsi sebagai tolok ukur capaian kegiatan dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang ditempuh agar tidak terjadinya berbagai hambatan.

Rencana Aksi ini secara umum menguraikan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub-kegiatan serta indikator dan target kinerja. Dengan mempedomani Rencana Aksi maka pelaksanaan program kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam DPA, diharapkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Metro dapat terlaksana, dalam upaya meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian visi misi Walikota Metro dengan catatan Rencana Aksi akan dapat tercapai apabila sama-sama berkomitmen dari seluruh unsur pimpinan dan staf yang disertai pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat.

Demikianlah dokumen Rencana Aksi untuk periode tahun 2024 yang disusun sebagai bagian dari pelaksanaan perencanaan pada Dinas Sosial Kota Metro.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA METRO



SRI AMANTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804201993031009